PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021

Oleh : Tomi Ahmad Badawai

Dosen Pembimbing : Dr. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6327

Abstract

Penanganan parkir ditepi jalan menjadi permasalahan ditegah masyarakat dimana penetapan aturan parkir belum diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum dilakukan pembinaan dan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru secara rutin sehingga berdaQpak bagi masyarakat dan penerimaan pendapatan asli Daerah. Pekanbaru masih ditemui adanya pelanggaran parkir melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana penanganan parkir tentunya dalam melaksanakan penanganan parkir tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan agar kegiatan parkir ditepi jalan Kota Pekanbaru berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor hambatan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian bahwasanya pembinaan dan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru dimana masih adanya petugas parkir yang belum menerapkan biaya retribusi parkir sesuai dengan aturan yang berlaku, belum adanya sanksi tegas bagi pengguna parkir illegal, belum adanya kegiatan pendataan dan pengawasan bagi setiap parkir yang ada di Kota Pekanbaru sehingga meresahkan masyarakat pengguna jasa parkir. Namun penulis menyarankan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan parkir, melakukan pendataan dan mengawasi lokasih parkir yang ada di Kota Pekanbaru di setiap hari kerja, pemberian sanksi tegas bagi petugas parkir yang melanggar aturan terutama menaikkan biaya retribusi parkir, dan memberikan sanksi bagi petugas parkir yang tidak menggunakan seragam parkir dan karcis parkir, serta melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam menampung saran masukan masyarakat terkait parkir di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Peran, Retribusi, Parkir

Abstract

Handling of roadside parking is a problem in the community where parking rules have not been implemented and implemented properly because there has not been regular guidance and supervision of parking in the city of Pekanbaru so that it has an impact on the community and revenues for the region's original income. Pekanbaru is still found to have parking violations through the Pekanbaru City Parking Technical Implementation Unit as an implementing element of parking handling, of course, carrying out parking handling cannot be separated

from guidance and supervision so that roadside parking activities in Pekanbaru City run according to applicable regulations. The purpose of this study was to determine the inhibiting factors for the Parking Technical Implementation Unit of the Pekanbaru City Transportation Service in the Guidance and Supervision of Parking in the City of Pekanbaru. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the guidance and supervision of parking in Pekanbaru City has not been carried out optimally by the Pekanbaru City Parking Technical Implementation Unit where there are still parking officers who have not applied parking retribution fees in accordance with applicable regulations, there are no strict sanctions for illegal parking users, there are no activities data collection and supervision for every parking lot in the city of Pekanbaru, causing concern for the parking service user community. However, the authors suggest that the Pekanbaru City Parking Technical Implementation Unit conducts guidance and supervision of parking activities, collects data and supervises parking locations in Pekanbaru City every working day, provides strict sanctions for parking officers who violate the rules, especially increasing parking fees, and imposes sanctions. for parking attendants who do not wear parking uniforms and parking tickets, as well as collaborating with the community in accommodating community input suggestions regarding parking in Pekanbaru City.

Keywords: Role, Retribution, Parking

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan Daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tersebut menjadi pedoman bagi pemerintahan Daerah untuk menjalankan fungsi Pemerintahan Daerah. (UUD 1945 Pasal (18) Ayat (1))

Salah satu fungsi pemerintah adalah pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan berkeadilan. Transparan dan

akuntabel. Hal ini berarti untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani agar masyarakat pengguna jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.

Pemerintah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan Kabupaten/kota yang tidak bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, Daerah Kabupaten dan daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada pasal 9 sampai dengan pasal 12 dimana dikatakan pada pasal 12 bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi[⊗] Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014)

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada era globalisasi semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*. (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014) Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam

pelaksanaan ketertiban dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, undang-undang ini lahir supaya daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi daerah. Pajak Daerah, sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan jenis pajak daerah pada pasal 2 point (2) dikatakan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas : (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame;
- a. Pajak Penerangan Jalan;
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pajak Parkir;
- d. Pajak Air Tanah;
- e. Pajak Sarang Burung Walet;
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perparkiran ditepi jalan umum tidak pada tempatnya dan tidak secara resmi dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Timbulnya parkir liar biasanya dalam acara-acara tertentu dan tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti gedung pertemuan, hotel, pusat perbelanjaan, tempat wisata,

restoran maupun rumah makan. Selain permasalahan tempat juga ada permasalahan karcis atau tanda parkir, sering kali karcis tidak diberikan kepada pengguna jasa parkir, terkhusus pengguna jasa parkir ditepi jalan umum, bahkan ada petugas parkir yang membuat kartu karcis sendiri tanpa ada dasar peraturan yang jelas.

Pemerintahan Indonesia memberikan wewenang azas otonomi disetiap daerah, maka setiap daerah diberi wewenang atas pelaksanaan tersebut untuk menentukan bagian-bagian pendapatan daerah yang perlu dilakukan pengaturan dalam proses penarikan dan retribusi daerah yang kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Di daerah Pekanbaru sendiri, salah satu bagian retribusi yang cukup menjanjikan adalah retribusi parkir ditepi jalan umum, dikarenakan semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan dan olahraga serta aktivitas perekonomian lainnya di pasar-pasar tradisional yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Pekanbaru, maka dari itu Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.

Lokasi parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan parkir ditepi jalan umum belum ditetapkan dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sehingga masih banyak parkir liar dan menimbulkan macet dikarenakan tidak pada posisi lokasi parkir pada khususnya melainkan ditepi jalan umum pada pinggiran jalan lalu lintas sehingga dapat

menimbulkan kemacetan dan keresahan pengendara.

Unsur pembinaan dan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru secara langsung dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang didasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Perparkiran berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 tentang pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dimana pada pasal 1 point (9) bahwa Unit Pelaksana Perparkiran selanjutnya disingkat UPT Perparkiran adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional pengelolaan parkir.(Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017)

Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan melakukan pengelolaan pendataan lokasi parkir dan melakukan pembinaan petugas parti serta melakukan pengawasan kegiatan parkir. Adapun bentuk dan upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dimana dikatakan pada pasal 18 pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran sebagaimana berikut (Peraturan Daerah Pekanbaru No 14 Tahun 2016)

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi

- b. Pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir.
 - c. Peningkatan disiplin kepada juru parkir.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Mengawasi petugas parkir dilapangan.
 - b. Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir
 - c. Mengawasi penyeteroran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penanganan parkir dinilai belum membuahkan hasil dimana lahan- lahan yang digunakan masyarakat masih banyak yang belum ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau wajib retribusi parkir dimana masih banyak kawasan parkir liar yang tidak dikelola oleh UPT Parkir sehingga menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan perlu adanya pengelolaan yang baik oleh Unit Pelaksana teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap parkir kedepanya. Dari upaya-upaya perbaikan pengelolaan parkir mulai dari pengawasan langsung ke lapangan, razia parkir liar, pemberian sanksi hukum sampai dengan penetapan petugas yang bertugas dalam pelaksana parkir dilapangan.

Santar operasional prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran dalam upaya penangan parkir ditepi jalan umum Kota Pekanbaru dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah diprogram dalam Rencana Kerja Tahunan

melalui pembinaan dan pengawasan parkir ditepi jalan. Adapun Santar operasional prosedur (SOP) berikut meliputi:

- a. Ketetapan aturan parkir.
- b. Lokasi penjagaan marka parkir.
- c. Kewajiban pemberian karcis parkir terhadap pengguna jasa parkir dan
- d. Penggunaan atribut parkir

Penertiban parkir ditepi jalan umum tidak terlepas dari bentuk pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru guna menghindari parkir liar adapun pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagaimana berikut:

1. Melakukan upaya pencegahan, penjangkauan, kendaraan yang sedang parkir tidak pada tempatnya.
2. Melakukan pendataan terhadap tempat parkir yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan.
3. Melakukan pengecekan terhadap anggota parkir yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
4. Memberi sanksi hukum bagi kepemilikan parkir liar yang tidak memiliki kartu keanggotaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
5. Pelanggaran parkir ditepi jalan umum sangatlah meresahkan masyarakat

Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah Pekanbaru belum terealisasi secara optimal sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru Tahun 2021
2. Apakah faktor penghambat Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan dan Pengawasan Parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2021

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian ini yakni :

- a. Bagaimanakah Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru Tahun 2021
- b. Apakah faktor penghambat Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan dan Pengawasan Parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2021

KERANGKA TEORI KOLABORASI

Dalam dunia pemerintahan, birokrasi dapat dipraktikkan sebagai suatu sistem atau proses yang diciptakan untuk menjamin mekanisme dan keteraturan kerja. Birokrasi juga dianggap sebagai sarana untuk merealisasikan suatu tujuan organisasi, dan para petinggi dalam birokrasi berperan sebagai pemantik dan pemicu dari sesuatu yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Menurut Max Weber, birokrasi seharusnya dijalankan dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dan komunikasi antar pekerja yang terbatas. Layaknya mesin yang

memiliki suku cadang yang berbeda fungsi, maka sistem birokrasi harus dirancang berdasarkan pembagian kerja dengan spesifikasi kerjanya masing-masing. Birokrasi juga harus memiliki karakteristik bahwa alur kekuasaannya terpusat karena dianggap menjadi lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan dan spesifikasi para pekerja. Menurutnya juga birokrasi adalah sistem yang tertutup karena lingkungan dianggap dapat mengganggu kinerja organisasi. Dan yang paling penting, menurutnya peraturan adalah hal utama dalam sistem birokrasi. Perilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya. (Miftah Thoha Perilaku Organisasi, 2015 : 138) Konsep perilaku organisasi adalah perilaku organisasi sebagai bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Perilaku dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun external. (Robbins, S.P. dan Timothy A. J: 2008, H. 11) Weber menjelaskan faktor faktor tersebut ialah adanya kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan, pengalaman dan reaksi terhadap sesuatu. (Ndraha, Taliziduhu: 2010, 36)

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. (Feriyanto, Andri dan Shytha Endang Triana, 2016:3) Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara cara membuat

kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (Handoko Hani, 2012, H. 359)

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manullang, M. Dasar-Dasar Manajemen, 2008, H. 173)

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana proses terjadi pada suatu fenomenal sosial atau hukum. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. (Anggito, Albi, & Johan Setiawan. (2018).)

Penelitian Ini Bermaksud Memeroleh Gambaran Mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru Tahun 2021

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan dan Pengawasan Parkir di Kota Pekanbaru

Peneliti untuk mengkaji mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru peneliti menganalisa Pembinaan Parkir sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi
- b. Pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir.
- c. Peningkatan disiplin kepada juru parkir

Pengawasan Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam bentuk:

- a. Mengawasi petugas parkir dilapangan.
- b. Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir

Dalam rangka membahas indikator tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan yang telah peneliti tetapkan sebelumnya untuk menjawab permasalahan terkait Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Adapun berikut hasil analisa terkait Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagaimana berikut:

1. Pembinaan Parkir di Kota Pekanbaru

Pembinaan Parkir Di Kota Pekanbaru adalah kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang secara langsung melakukan pembinaan terhadap petugas parkir sehingga petugas parkir memiliki kemampuan atau pemahaman peraturan parkir, dan Melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait aturan parkir mulai dari penempatan parkir dan biaya retribusi parkir, serta memberikan pendidilakn pelatihan bagi petugas parkir sehingga petugas parkir disiplin dan taat aturan dalam penjagaan parkir. Kegiatan parkir yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Berdasarkan hasil peneliti berikut hasil wawancara terkait Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagaimana berikut:

a. Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Melalui Sosialisasi

Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi adalah pemberian sosialisasi bagi masyarakat secara langsung terkait aturan parkir mulai dari pembayaran besar retribusi parkir dan lokasi parkir serta kelayakan petugas parkir dalam melakukan penjaan parkir, Hal ini di utarakan melalui aturan dalam bentuk pamflet di ruas jalan umu Kota Pekanbaru dan lokasi parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat pengguna jasa parkir menunjukkan bahwa UPT Perparkiran Kota Pekanbaru belum melakukan sosialisasi bagi masyarakat secara luas aturan parkir mulai dari penempatan parkir, petugas parkir, hingga retribusi parkir sehingga adanya pelanggaran ayang dilakukan petugas parkir terutama pada biaya retribusi parkir.

b. Pendidikan dan Pelatihan Kepada Juru Parkir

Pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir adalah pemberian kemampuan bagi petugas parkir dalam menaati peraturan dalam melakukan penjagaan parkir sehingga kegiatan Pendidikan pelatihan dilakukan secara menyeluruh bagi petugas parkir sehingga tidak adanya pelanggaran saat penjagaan parkir, kegiatan ini dilakukan secara langsung oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru terhadap petugas parkir.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa UPT parkir belum

memberikan pelatihan dan Pendidikan bagi petugas parkir secara langsung melainkan hanya pemberian arahan oleh bos petugas parkir atau pihak ketiga pemegang tender sehingga petugas parkir belum menerapkan aturan dalam penjagaan parkir sesuai dengan aturan bahwa petugas parkir belum memberikan karcis bagi pengguna jasa parkir dan penetapan retribusi parkir diluar ketentuan seperti sepeda motor ketetapanya Rp1000 melainkan kebanyakan ditetapkan sebesar Rp2000 sehingga memberatkan masyarakat.

c. Peningkatan Disiplin Kepada Juru Parkir

Peningkatan disiplin kepada juru parkir adalah pemberian arahan oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru bagi petugas parkir sehingga tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan petugas parkir mulai dari lokasi parkir, penggunaan seragam petuga parkir hingga retribusi biaya parkir.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan peneliti baik wawancara secara langsung dengan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pendidikan, petugas parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir dalam peningkatan isiplin kepada juru parkir dalam penjagaan parkir di Tepi jalan umum Kota Pekanbaru.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah bentuk kegiatan UPT Perparkiran Kota pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan parkir di tepi jalam umum Kota pekanbaru dalam mewujudkan penertiban lokasi parkir dan petugas parkir sehingga tidak adanya pelanggaran yang terjadi sehingga meresahkan masyarakat pengguna jasa parkir.

a. Mengawasi Petugas Parkir di Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa UPT Perparkiran tidak turun kelokasi parkir untuk melakukan pengawasan parkir melainkan hanya sebatas menerima laporan saja dari kepala parkir sehingga petugas parkir masih banyak menyalahgunakan aturan seperti tidak menggunakan seragam parkir, pemberian karcis, bahkan biaya retribusi parkir tidak sesuai aturan terutama sepeda motor Rp1000 melainkan Rp 2000.

b. Mengawasi Ketertiban Kendaraan Yang Parkir

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa UPT Perparkiran tidak turun untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang parkir ditepi jalan umum tidak pada tempatnya kegiatan pengawasan belum adanya ketetapan waktu sehingga banyak kendaraan parkir pada tepi jalan umum yang dapat mengganggu aktifitas kendaraan lain.

B. Faktor Penghambat Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru (Tahun 2021) diketahui sebagai berikut:

1. Belum dilakukan pengawasan secara rutin oleh Petugas UPT Perparkiran sehingga sebagian besar terlihat petugas parkir masih belum memberikan karcis parkir bagi pengguna jasa parkir serta tidak menggunakan rompi parkir sehingga hal ini melanggar aturan petugas parkir.
2. Penerapan peraturan retribusi parkir UPT Perparkiran belum disosialisasikan melalui papan pemberitahuan secara merata di jalanan umum Kota Pekanbaru bahwa di Lokasi parkir sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui aturan parkir terutama retribusi pembayaran parkir yang terkadang membingungkan seperti sepeda motor dalam aturan Rp1000 malah kebanyakan pembayaran Rp. 2000 di tepi jalan umum Kota Pekanbaru.
3. Belum adanya kegiatan pembinaan dengan serius dilakukan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru terhadap petugas parkir melainkan diserahkan pada pihak ke 3 pemenang tender parkir sehingga banyak kesalahan pelanggaran aturan yang dilakukan petugas parkir.
4. Belum adanya kegiatan pendataan yang dilakukan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru sehingga masih ditemui parkir liar yang beroperasi seperti di Jalan Ahmad Yani, dimana petugas parkir liar masih terlihat melakukan penjaan parkir.
5. Diketahui masyarakat pemakai jasa lokasi parkir masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir.

6. Belum adanya penerapan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dalam menerima atau menampung keluhan masyarakat terkait penggunaan jasa parkir dalam bentuk website atau kota saran di setiap lokasi parkir sehingga memberikan masukan terhadap UPT Perparkiran Kota Pekanbaru.
7. Belum adanya evaluasi yang dilakukan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dalam memberikan dampak keberhasilan retribusi parkir dimana masih banyak pelanggaran yang terjadi terutama pada lokasi parkir dan pembayaran jasa parkir belum adanya penangan yang serius oleh UPT Perparkiran Pekanbaru.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru maka berikut penulis uraikan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan parkir di Jalan Umum Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal dimana masih belum adanya tindak tegas oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru terutama dalam melakukan pengawasan pada lokasi parkir dimana masih banyak terjadi

pelanggaran seperti petugas parkir yang tidak menanati aturan petugas parkir, belum adanya sosialisasi terkait aturan retribusi parkir di jalam umum Kota Pekanbaru melalui pamflet pemberitahuan sehingga masyarakat masih banyak tidak mengetahui jasa pembayaran retribusi parkir, serta belum adanya tindaktegas oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru bagi pelanggar aturan parkir terutama bagi petugas parkir sehingga aturan retribusi parkir belum maksimal diterapkan di Kota Pekanbaru.

2. Faktor penghambatan Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru diketahui bahwa belum dilakukan pengawasan secara rutin oleh Petugas UPT Perparkiran sehingga sebagian besar terlihat petugas parkir masih belum memberikan karcis parkir bagi pengguna jasa parkir, penerapan peraturan retribusi parkir UPT Perparkiran belum disosialisasikan melalui papan pemberitahuan secara merata di jalanan umum Kota Pekanbaru, belum adanya kegiatan pembinaan dengan serius dilakukan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru terhadap petugas parkir, belum adanya kegiatan pendataan yang dilakukan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru sehingga masih ditemui parkir liar yang beroperasi, kurangnya antusias masyarakat pemakai jasa lokasi parkir bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar

parkir, belum adanya penerapan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dalam menerima atau menampung keluhan masyarakat, belum adanya evaluasi yang dilakukan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dalam memberikan dampak keberhasilan retribusi parkir

SARAN

Salah satu fungsi pemerintah adalah pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan berkeadilan. Transparan dan akuntabel. Hal ini berarti untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani agar masyarakat pengguna jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.

Pemerintahan Indonesia memberikan wewenang azas otonomi disetiap daerah, maka setiap daerah diberi wewenang atas pelaksanaan tersebut untuk menentukan bagian-bagian pendapatan daerah yang perlu dilakukan pengaturan dalam proses penarikan dan retribusi daerah yang kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Di daerah Pekanbaru sendiri, salah satu bagian retribusi yang cukup menjanjikan adalah retribusi parkir ditepi jalan umum, dikarenakan semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan dan olahraga serta aktivitas perekonomian lainnya di pasar-pasar tradisional yang

berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Pekanbaru, maka dari itu Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru maka berikut penulis uraikan beberapa saran antara lain :

1. Sebaiknya UPT Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum melalui papan pemberitahuan di jalanan umum Kota Pekanbaru bahwakan di lokasi parkir,
2. Sebaiknya UPT Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin dalam kegiatan parkir sehingga tidak melanggar aturan parkir
3. Sebaiknya UPT Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pembinaan dengan serius terutama terhadap petugas parkir
4. Sebaiknya UPT Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pendataan pada lokasi Parkir sehingga tidak adanya parkir liar yang beroperasi,
5. Pelunya antusias masyarakat pemakai jasa lokasi parkir untuk membayar parkir,
6. Sebaiknya UPT Perparkiran Kota Pekanbaru menyediakan website atau kota saran dalam menerima atau menampung keluhan masyarakat,
7. Sebaiknya UPT Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan evaluasi

dalam memberikan dampak keberhasilan retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggito, Albi, & Johan Setiawan. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Rachman, Budiman. 2010. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bina Akasara.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Efendi Maharizal, 2003, *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Mediaterra.
- Handayaningrat, Soewarno. 2001. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.
- Hardiman. 2010. *Pengantar Organisasi Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-yogyakarta.
- Hidayat. 2007. *Organisasi Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mangunhardjana. 2004. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Jakarta: anisius.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Musanef. 2010. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT. Perca.

- Miftah Thoha, 2005, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, Raja Grafika Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu.. 2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Robbins, S.P. dan Timothy A. J. 2008. *Perilaku Organisasi. Penerjemah Diana Angelica*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.
- Sunyoto, Danang dan Burhanudin. *Perilaku Organisasi (cetakan ertama)*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Soekamto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tanzeh Ahmad, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Thoha, Miftah. 2002. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Wijadja dan HAW. 2000. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Fitri Ramadani. 2015. *Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatikakota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkirtahun 2013*.
- Irvan Ramadhan. 2019. *Pengelolaan Perpajakan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan*

Tugas Oleh Juru Parkir Tahun 2017).

Tio Aditya Isnanto. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang.*

Try Bambang H. 2019. *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepontonomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.*

Zikri Hidayatul Husni. 2020. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan Hr.Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.*

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 tentang pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru